BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN

Cikal bakal TELKOM adalah suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdlenst yang didirikan dengan Staadsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah Post, Telegraaf en Telefoondients atau disebut ***PTT - Dients***. PTT - Dients ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W. Undang – undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara (PN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan, bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.B. dilebur kedalam ***Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).***

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi untuk menjasi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah Perusahaan Pos dan Giro (PN. Pos dan Giro) dan pendirian ***Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN. Telekomunikasi)*** diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 30 tahun 965. Bentuk ini pun dikembangkan menjadi ***Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi*** melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan asing, yakni dari Amarican Cable and Radio Corporation, suatu perusahaan didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari America Cable and Radio Corporation. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum Internasional.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai insfrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itu berdirilah ***Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM***.

RESTRUKTURISASI INTERNAL TELKOM

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas internasional, maupun regional, maka TELKOM pada tahun 1995 ini melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internasional, penerapan Kerja Sama Operasi (KSO) dan persiapan Go Public/ Internasional atau dikenal dengan Initial Public Offering. Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha utama TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan bidang terkait termasuk Sistem Bergerak Selular (STSB), sirkit langganan, teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu.

Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait. Yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapus struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL,

bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network, Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi diwilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatera
2. Divisi Regional II, Jakarta dan Sekitarnya
3. Divisi Regional III, Jawa Barat
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional V, Jawa Timur
6. Divisi Regional VI, Kalimantan
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali Nusatenggara, Timor timur, maluku dan Irian Jaya

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan Divisi-divisi Pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti, Divisi Sistem Informasi. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor Pusat juga mengalami perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka Kantor Pusat diubah menjadi pusat biaya (cost centre). Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia, maka Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit.

Kantor Perusahaan TELKOM berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, Kantor Perusahaan hanyalah menetapkan hal-hal yang strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing Divisi.

Struktur manajemen TELKOM, secara garis besar meliputi Kantor Perusahaan, Divisi Regional I s/d VII, Divisi Network, dan Divisi Pendukung. Kantor Perusahaan strukturnya sangat sederhana, hanya terdiri dari Dewan Direksi, yang dibantu kelompok Pengembangan Bisinis, Sekretaris Perusahaan Kepala Audit Internal dan beberapa Vice President.

KEGIATAN USAHA

Jasa telekomunikasi yang disediakan TELKOM dibagi dalam dua kelompok, jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama TELKOM sampai saat ini adalah menyediakan PSTN (Public Switch Telephone Network) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN.

Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai 1995 ini adalah :

1. Jasa Telepon Dalam Negeri,
2. Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain,
3. Jasa Telepon Bergerak Selular,
4. Jasa Satelit,
5. Jasa Lainnya.

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal jarak jauh. Dari catatan tahun 1994 ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian telepon. Pelayanan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun coin. Disamping memperoleh pandapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara telekomunikasi internasional dan STBS (Sistem Telepon Bergerak Selular).

Pendapatan interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT. INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan interkoneksi, TELKOM juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder Satelit, mulai tahun 1996 akan beralih kepada SATELINDO, namun TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimili. Menghadapi kondisi ini TELKOM pun sudah menandatangani memorandum of understanding dengan PT. POS Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegrap.

KERJA SAMA OPERASI

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya, maka TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya. Partisipasi swasta sampai saat ini dikenal dalam bentuk pola bagi hasil (PBH), perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO). KSO ini merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu Divisi dari TELKOM. Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I Sumatera, Divisi Regional III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY, Divisi Regional VI Kalimantan dan Divisi VII Kepulauan, Divisi KSO dikelola oleh mitra KSO, yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri. Masa KSO ditetapkan selama 15 tahun, dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan dengan sarana/jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan dialihkan kepada TELKOM. Dari 5 juta SST yang harus dibangun selama Repelita VI, 2 juta SST akan dilaksanakan oleh Mitra KSO.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh notaris Imas Fatimah, SH. Untuk itu TELKOM mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

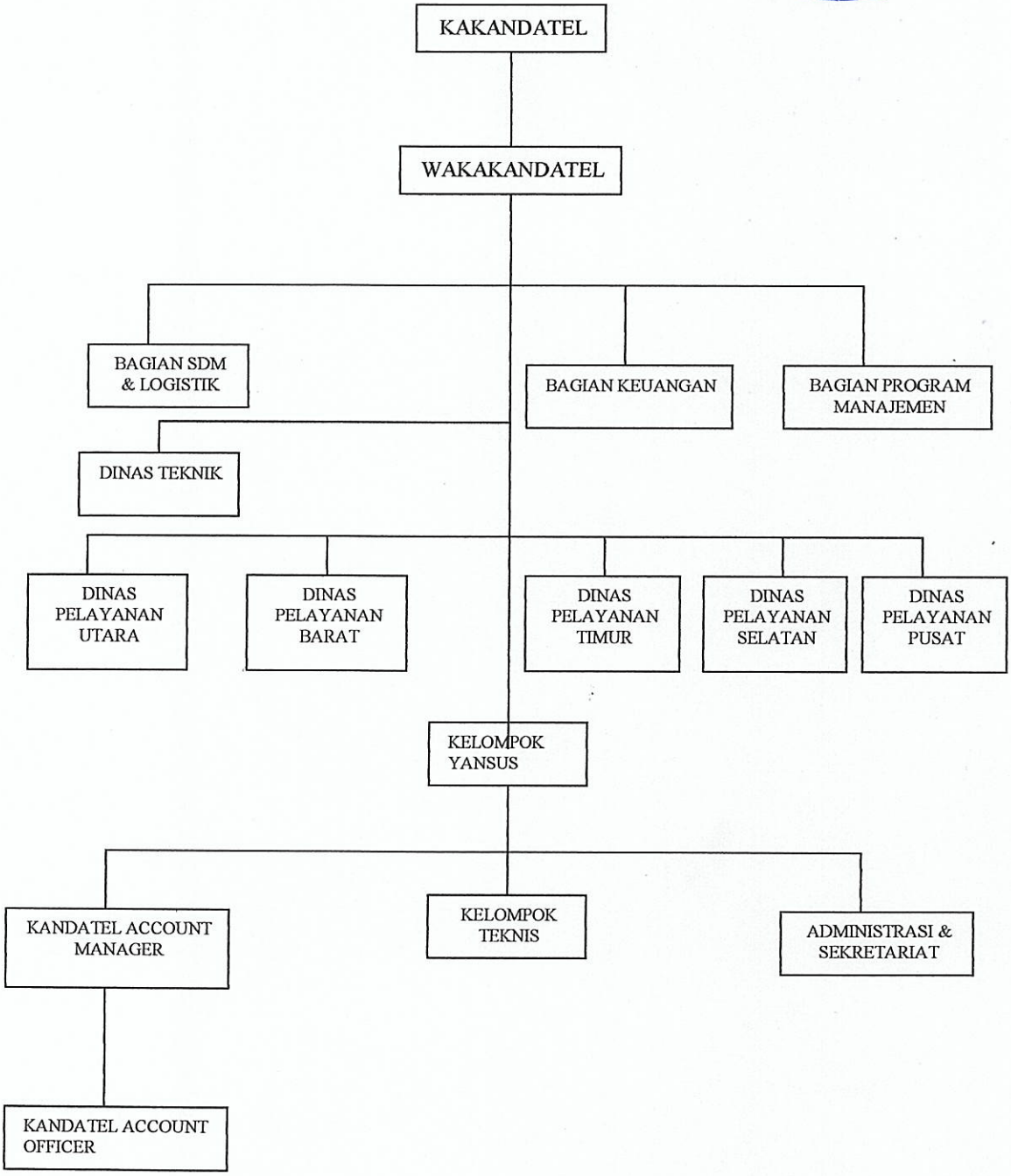
Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri Dwiwarna yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun juga. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan saham seri B adalah Atas Nama dan dapat dipindahtangankan.

Dalam kaitan IPO ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan khusus sejumlah Saham Seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum di Indonesia. Program pemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Ownership Plan (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan (1 Tahun) setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari Emisi saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan wireles local loop. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia.

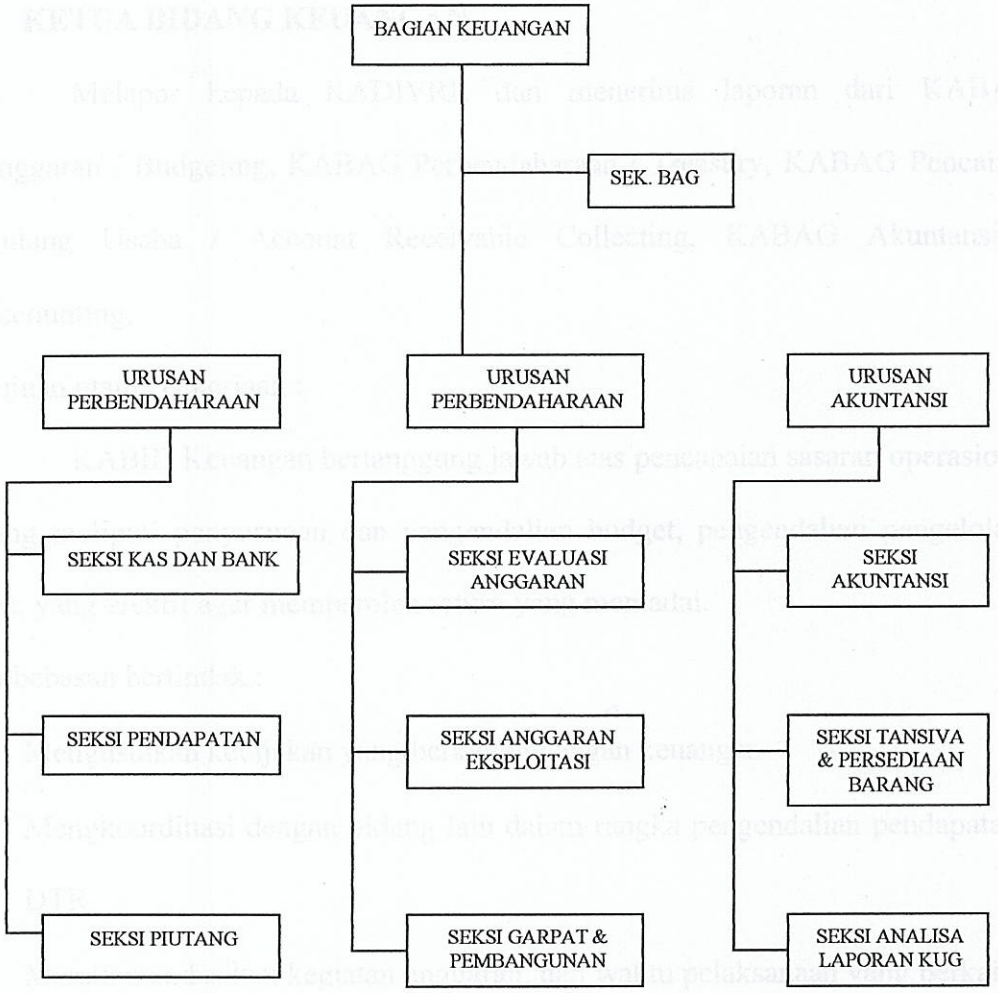
Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik Regional maupun Internasional, peningkatan kemampuan

kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (World Class Operator).

2.2 STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN



2. KEPALA BAGIAN (KABAG) PERBENDAHARAAN

Melapor kepada KABID Keuangan dan menerima laporan dari Spe Cash Management, Spe Adm Perpajakan dan Pelaporan, dan Spe Verifikasi.

Tujuan utama pekerjaan :

KABAG Perbendaharaan bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mengadministrasikan uang perusahaan, serta menyelenggarakan manajemen kas, sehingga dicapai tingkat likuiditas Divisi yang optimal.

Kebebasan bertindak :

- Melaksanakan peningkatan non operating revenue dari penempatan dana.
- Mengamankan uang perusahaan (manajemen kas).
- Melaksanakan verifikasi yang memadai setiap proses pembayaran.
- Menyusun TNA untuk setiap lingkup pekerjaan di area yang bertanggungjawabnya.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai di area yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menyusun sistem pelaporan dari seluruh kegiatan unit organisasi di area yang menjadi tanggung jawabnya.

3. KEPALA BAGIAN (KABAG) ANGGARAN

Melapor kepada KABID Keuangan dan menerima laporan dari Spe Beban, Spe System dan analisis, dan Spe Revenue.

Tujuan utama pekerjaan :

KABAG Budgeting bertanggung jawab atas pengkoordinasian penyusunan revisi anggaran, pengendalian atas pelaksanaan anggaran, evaluasi terhadap

performansi berdasarkan pelaksanaan anggaran, serta menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran untuk pencapaian target Divisi baik dalam pengelolaan anggaran maupun performansi keuangan Divisi Regional III.

Kebebasan bertindak :

- Menyajikan peringatan dini serta merekomendasikan langkah – langkah pengamanan pendapatan DTR kepada manajemen keuangan.
- Merekomendasikan kebijakan dalam proses penyusun dan revisi anggaran (termasuk penetapan software, asumsi, prosedur, dan format yang digunakan).
- Merekomendasikan cara-cara metode pelaksanaan evaluasi anggaran yang paling efektif dan efisien.
- Merekomendasikan format layout dan sistematika pelaporan anggaran yang informatif dan berbobot.
- Menyusun TNA untuk setiap lingkup pekerjaan di area yang menjadi tanggung jawabnya.
- Melaksanakan pengembangan kompetisi untuk setiap pegawai di area yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menyusun sistem pelaporan dari seluruh kegiatan unit organisasi di area yang menjadi tanggung jawabnya.

4. KEPALA BAGIAN (KABAG) PENCAIRAN PIUTANG USAHA

Melapor kepada KABID Keuangan dan menerima laporan dari Spe Adm Piutang dan Analisa, dan Spe Adm Piutang.

Tujuan utama pekerjaan :

KABAG pencairan Piutang Usaha bertanggung jawab atas pengoptimalisasian pencarian piutang usaha dan menggali cara penagihan baru, sehingga realisasi piutang sesuai target.

Kebebasan bertindak :

- Melaksanakan percepatan penerimaan uang dengan menggali cara penagihan efektif.
- Menjalin hubungan baik dengan semua pihak terkait dalam rangka percepatan penagihan.
- Menyusun TNA untuk setiap lingkup pekerjaan di area yang menjadi bertanggungjawabnya.
- Melaksanakan pengembangan kompetisi untuk setiap pegawai di area yang bertanggungjawabnya.
- Menyusun sistem pelaporan dari seluruh kegiatan unit organisasi di area yang menjadi tanggung jawabnya.

5. KEPALA BAGIAN (KABAG) AKUNTANSI

Melapor kepada KABID Keuangan dan menerima laporan dari Spe Transaksi, Spe Pelaporan dan Analisa Keuangan, dan Spe System dan Procedure.

Tujuan utama pekerjaan :

KABAG Akuntansi bertanggungjawab terhadap penyajian pelaporan keuangan kepada manajemen secara akurat, tepat waktu, sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen.

Kebebasan bertindak :

- Merekomendasikan pengembangan sistem prosedur dan kebijakan akuntansi sesuai dengan perkembangan perusahaan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem prosedur dan kebijakan akuntansi intern perusahaan dan ekstern perusahaan (KKSO III / PT AWI).
- Menyusun TNA untuk setiap lingkup pekerjaan di area yang menjadi bertanggungjawabnya.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai di area yang bertanggungjawabnya.
- Menyusun sistem pelaporan dari seluruh kegiatan unit organisasi di area yang menjadi tanggung jawabnya.

2.4 ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

Rencana Kerja Manajemen dan Operasi (RMO) merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional baik teknis maupun non teknis dan pengembangan bisnis bagi segenap jajaran Manajemen Divisi Regional III dalam jangka pendek tahunan.

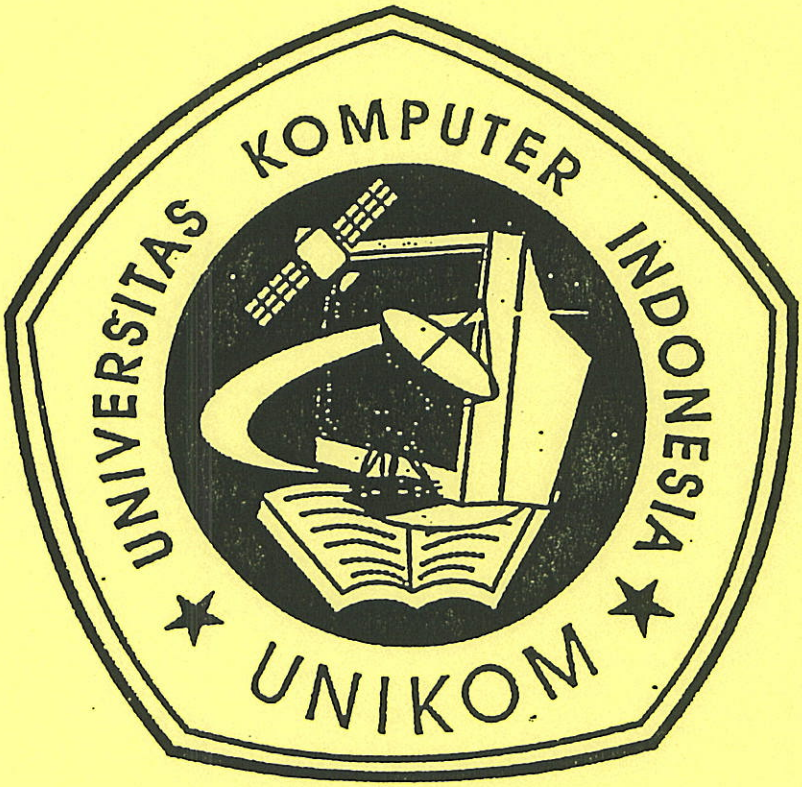
Faktor yang merupakan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan perusahaan tahun mendatang adalah pengaruh eksternal yang meliputi perilaku pelanggan, ekonomi, politik, keamanan, sosial buadaya, kompetisi dan regulasi pemerintah yang analisanya merupakan kelengkapan RMO ini.

Kegiatan-kegiatan perusahaan pada tahun 2000 – 2001 kurang berjalan lancar.

1 BIDANG KEUANGAN

Rencana Kerja :

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur sentralisasi/desentralisasi keuangan
   a. Sentralisasi pada kegiatan Keuangan untuk pembayaran Payroll, Pajak PPN, gaji SATPAM di DIVRE III.
   b. Desentralisasi kegiatan Keuangan diluar butir a.
2. Menetapkan Program Pengelolaan Kas
   a. Pengurangan jumlah transaksi tunai.
   b. Peningkatan pengelolaan dana kas pada masing-masing unit Operasional.
   c. Permintaan data/dropping dari cost centre sesuai kebutuhan riilnya dalam suatu periode (mingguan).
3. Pengelolaan dan Pengendalian Biaya
   a. Pengembangan pelaporan keuangan secara on-line bekerjasama dengan Bank.
   b. Penetapan pengendalian intern atas biaya
   c. Penetapan proses dan prosedur efisiensi biaya.
4. Peningkatan Cycle Time Pengumpulan Pendapatan secara Tunai
   a. Penetapa Collection-Fee yang sesuai, untuk Collection agents.
   b. Pengawasan terhadap jumlah transfer Bank.
   c. Pengurangan jumlah debitor yang menunggak.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM